

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pakistan merupakan negara terbelakang ke dua dunia dalam hal kesetaraan gender menurut data *World Economic Forum* dengan populasi penduduk yang tinggi dan terus bertumbuh.¹ Kondisi pendidikan perempuan bahkan lebih buruk daripada laki-laki, Hal ini disebabkan oleh para orang tua tidak menganggap pendidikan sebagai hal yang baik bagi perempuan. Tingkat kesetaraan Pendidikan perempuan 58%, kesetaraan ekonomi 69%, dan kesetaraan politik 59,8%. Namun, isu terkait dengan ketimpangan gender memiliki populasi yang cukup tinggi yaitu hampir 227 juta orang dengan 49,2% Perempuan dan 50,8% Laki-laki.²

Upaya pemerintah Pakistan untuk mengatasi isu ketimpangan gender mendapat kesulitan, karena penyebabnya yang sudah menjadi bagian kehidupan di Pakistan yang ditanamkan dari kecil.³ Namun, dapat dijelaskan bahwa marginalisasi yang dialami perempuan Pakistan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Dengan adanya ketimpangan gender dan pendidikan semakin menurun. Diskriminasi ini dari kebiasaan adat yang membedakan akses yang dimiliki laki-laki dan perempuan di Pakistan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Perempuan Pakistan sangatlah menderita akibat pola pikir atau gagasan tentang kehormatan yang

¹ Leonard Rengga Viano Deris, dkk. "Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (34 Provinsi) Taun 2015-2020." *Sibatik Journal*, 1, No. 12 (2022): 2947-2958.

² Weforum. "Global Gender Gap Report 2022." World Economic Forum, Diakses pada 16 Maret 2023 melalui <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/>.

³ UN women organization journal of gender in Pakistan (2019) Hal 50-52

tidak berdasarkan ditentukan oleh norma sosial dan budaya, termasuk bagi pria yang menyangkal hak asasi perempuan. Laki-laki mengontrol dan mendikte perempuan Pakistan tentang pola perilaku, kegiatan, gerakan, terutama anggota keluarga laki-laki mereka. Selain itu, undang-undang dan hukum tentang kekerasan berbasis pendidikan di Pakistan menjadi acuan terhadap kualitas pendidikan oleh pemerintah dengan berbagai upaya, seperti *literature* pada pasal 37 (b) & (C) dengan secara adil dan menyeluruh akibat masih ada norma sosial dan budaya yang mewajarkan kekerasan berbasis gender dan menyakiti perempuan Pakistan.⁴

Dalam hal ketimpangan gender adanya organisasi UN women di Pakistan pada tahun 2019 dan organisasi ini memiliki peran aktif untuk masalah ketimpangan gender di Pakistan. UN Women kemudian bertujuan untuk memberikan solusi serta peran dalam menangani situasi ketimpangan gender yang terjadi di Pakistan, khususnya untuk kaum perempuan dalam mendapatkan kesetaraan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, politik, maupun sosial budaya.⁵ Dengan analisis UN women secara global melakukan sebanyak 1.187 perjanjian perdamaian tahun 1990-2019, wanita hanya mencakup 3% dari mediator 13 % dari negosiator dan 5% saksi dan penandatanganan dalam semua proses perdamaian yang tercatat dan jumlah ini tentunya harus dapat ditambah karena perempuan dapat memainkan peran kunci dalam menjaga perdamaian melalui perannya di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

⁴ Azizah, Nur & Rahmawati, Febri. (2022). Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan.

⁵ United Nations Human Rights.” Kesetaraan Gender dan Hak-hak perempuan .”OHCHR, Diakses pada 9 Mei 2023 melalui https://www.ohchr.org/en/topic/gender-equality-and-womens-rights?gclid=CjwKCAjw3ueiBhBmEiwA4BhspMRm14t2J1vLVNibTzMCWqVOz3v5TV4xHxuQH4v2J-0MqPNXNe58aRoC-IsQAvD_BwE.

Organisasi UN Women menaruh badan yang menaruh perhatian terhadap isu kesetaraan gender di Pakistan. UN Women lahir pada tanggal 2 Juli tahun 2010 namun tujuan dibentuknya UN Women adalah untuk meningkatkan upaya yang dilakukan sistem PBB lainnya, seperti UNICEF, UNDP, dan UNFPA, yang semuanya bekerja secara berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan keahlian masing-masing.⁶ IGO ini membantu perempuan mempunyai pendidikan dan ekonomi yang stabil dan bergerak dalam bidang usaha. Organisasi ini membantu diskriminasi terhadap perempuan dengan melakukan Program yang dilakukan yaitu *Women peace program, violence against women, women economic empowerment and home based workers* dalam program ini ketimpangan Pakistan sangat terbuka dalam hal ekonomi dan keamanan gender dengan faktor pendidikan yang rendah bahkan buta huruf membuat kontribusi para penduduk dengan usia produktif menjadi terbuang yang disebabkan pendidikan berkurang ataupun pernikahan muda yang bertambah.⁷

Berdasarkan dari analisis organisasi UN women dinyatakan setiap tahun terus meningkat isu ketimpangan gender di Pakistan. Masalah menurunnya pendidikan, serta ekonomi yang tidak stabil terjadilah ketimpangan gender di Pakistan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya data yang konsisten tentang kekerasan terhadap perempuan untuk mendukung pengembangan respons kebijakan yang tepat yang menyebabkan reformasi kebijakan menjadi tidak efektif dan lemah.⁸

⁶ Journal UN women organization of Pakistan (2020)

⁷ UNwomen inequality ac.id (2020)

⁸ Zaitunah Subhan, "Gender Dalam Tinjauan Tafsir," Journal Internasional Kajian Gender, www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/download/34/25, accessed July 3, 2019

Dari data yang dilaporkan, kekerasan terhadap perempuan tersebar luas 34% perempuan pernah kawin pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional oleh pasangan, dan 56% perempuan pernah kawin yang dilaporkan mengalami kekerasan fisik atau seksual pernah mengalami tidak mencari bantuan untuk menghentikan kekerasan atau memberi tahu siapa pun dan terus meningkat dan tidak ada progress dalam hal menurunkan masalah kebijakan terhadap permasalahan perempuan di Pakistan.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Pakistan merupakan negara terbelakang ke dua dunia dalam hal ketimpangan gender dengan populasi penduduk yang tinggi dan terus bertumbuh. Pemerintah Pakistan sangat susah dalam melakukan tindakan yang sudah menjadi bagian kehidupan di Pakistan yang ditanamkan dari kecil. Nmun, UN Women dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan upaya yang telah dilakukan melalui sistem PBB lainnya dengan berdasarkan analisis dari UN Women yang dinyatakan terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, UN Women memiliki target dalam menanggapi isu ketimpangan gender yang terjadi di Pakistan tersebut. Namun di Pakistan tingkat diskriminasi dan juga kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi hingga saat ini. Dengan demikian, perlu untuk mengkaji bagaimana peran UN Women dalam mengatasi isu ketimpangan gender yang terjadi di Pakistan.

⁹About UN Women Pakistan of organization Dalam <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan>

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah dalam hal pertanyaan penelitian penulis adalah “Bagaimana peran UN women dalam mengatasi masalah ketimpangan gender di Pakistan”?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini ada 2 jenis diteliti yaitu penelitian praktis dan penelitian *development*:

1. Tujuan *praktis* dalam penelitian Peran UN women dalam kesetaraan gender perempuan membahas dalam hal perdamaian dengan kepedulian atau impact terhadap perempuan serta komitmennya terhadap pemerintah untuk membuktikan keberhasilan UN Women membentuk ketimpangan gender yang banyak mempengaruhi nya menjadi hal yang tidak berdampak bagi perempuan dan juga keadilan, setelah itu untuk menjadikan perempuan dengan mempunyai pendidikan serta ekonomi yang memadai.
2. Tujuan secara *akademis* yaitu mengembangkan penelitian ini secara *fleksibel* dengan adanya organisasi UN women ini untuk kesetaraan gender di Pakistan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam hal perdamaian. IGO juga memberikan pengaruh besar agar perempuan dapat mengembangkan kemampuan daripada laki-laki.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini ditujukan ada 2 manfaat secara praktis, dan secara Teoritis untuk menjelaskan peran UN women dalam permasalahan sosial yang mempengaruhi kesetaraan gender oleh UN Women peace building di Pakistan dan menjelaskan konsep kesetaraan social IGO dengan menggunakan data pemelihara perdamaian PBB yang terpilah berdasarkan gender yang disusun dalam *SIPRI's Multilateral Peace Basis Data Operasi*, adalah mungkin untuk mengidentifikasi perkembangan yang menunjukkan peningkatan dan tantangan berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi perempuan secara berkelanjutan dalam operasi pemeliharaan perdamaian.

1. Manfaat secara akademis ini adalah untuk menambah pengetahuan pembaca dengan adanya peran UN Women dalam memperjuangkan *gender equality* di Pakistan mampu memberi pengaruh yang cukup signifikan baik dalam memperjuangkan *gender equality* dan pemberdayaan perempuan beserta mengakhiri kekerasan dan diskriminasi dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, serta keberadaannya tidak dianggap sebelah mata oleh masyarakat dan negara.
2. Manfaat secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan mengenai teori serta konsep dalam studi Hubungan Internasional, khususnya mengenai isu global, yaitu pembangunan berkelanjutan, pendidikan pertumbuhan ekonomi, dan kesetaraan gender. Penelitian ini dapat berkontribusi secara teoritis dalam hal mendalami

peranan media sosial dalam mengatasi isu global, khususnya mengenai peningkatan perekonomian dan taraf hidup perempuan.

1.6. Tinjauan Pustaka

Dalam menjelaskan penelitian ini, termasuk dalam hal tinjauan yang digunakan penulis untuk meneliti peran UN Women yaitu:

Tinjauan Pertama yaitu, faktor yang sudah disebutkan kemudian dibahas kembali untuk dilihat relasinya dalam artikel “*Moving Out Of Poverty And Women's Empowerment In Pakistan*”.¹⁰ Artikel ini membahas mengenai kemungkinan terjadinya mobilitas sosial dengan adanya pemberdayaan perempuan di Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan dan lemahnya *power* yang dimiliki perempuan dalam rumah tangga berpengaruh pada rendahnya hingga tidak adanya mobilitas sosial yang terjadi.

Artikel ini membantu peneliti menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan serta *power* yang dimiliki perempuan daripada laki-laki. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi dalam membantu peneliti mendapatkan informasi terkait dengan ketimpangan gender khususnya bagi perempuan dalam bidang pendidikan. Berikutnya, yang menjadi perbedaan antara artikel ini dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa artikel ini membahas terkait dengan bagaimana *power* yang dimiliki oleh kaum perempuan yang berada di Pakistan. Sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas *power* kaum perempuan melainkan ketimpangan yang dirasakan

¹⁰ Jamal, H. and A.J. Khan, The changing profile of regional inequality. Pak. Dev. Rev., (2003) Hal 6.

oleh kaum perempuan di Pakistan. Oleh karena itu, artikel ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan.

Tinjauan kedua yaitu, Sektor lain yang dibahas adalah sektor ekonomi di mana sebelumnya warga Pakistan seringkali dituntut untuk mengurus urusan rumah saja, dan tidak bekerja. Dalam” *The Contribution of Women Organizations to the Economic Empowerment of Craftswomen: Case Study of The National Association of Women Organizations in Pakistan.*”¹¹ disebutkan bahwa organisasi Nawou berusaha membantu mengedukasi perempuan dengan mengajarkan perempuan pekerjaan di sektor industri rumah tangga seperti konveksi, menyulam, membuat hiasan dan membuat alas tidur (*string bed*).

Artikel ini membantu peneliti dengan memberikan informasi terkait dengan sektor ekonomi yang dilakukan oleh kaum perempuan, di mana sebelumnya di Pakistan kaum perempuan dituntut untuk hanya di rumah saja dan tidak diperbolehkan untuk bekerja. Kemudian, artikel ini juga berkontribusi dengan membantu peneliti dalam menemukan sektor ekonomi apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan di Pakistan. Selanjutnya, yang menjadi pembeda antara artikel dengan penelitian ini adalah bahwa artikel ini lebih berfokus membahas tentang sektor perekonomian kaum perempuan di Pakistan. Sedangkan, dalam penelitian ini berfokus kepada permasalahan ketimpangan gender yang mencakup di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, politik, serta sosial dan budaya. Oleh karena itu, artikel dan penelitian ini kemudian memiliki perbedaan pada fokus pembahasannya.

¹¹ Jamal, H. and A.J. Khan, The changing profile of regional inequality. Pak. Dev. Rev., (2003) Hal 10.

Tinjauan ketiga yaitu, “masih” berkaitan dengan politik, artikel berjudul “*The Politics of Gender in Pakistan Symbolism in the Service of Pragmatism.*”¹² membahas mengenai pengaruh perempuan yang menguat dalam pemilihan parlemen. Ottemoeller berpendapat bahwa hal itu terjadi dikarenakan isu gender dijadikan alat politik bagi politisi yang ingin mendapatkan kekuasaan.¹³ Hal itu dikarenakan perempuan banyak yang menjadi pasukan tentara aktif, menyusun strategi gerilya, hingga menyediakan logistik perang. Faktor lain yang berpengaruh adalah meluasnya gerakan feminisme internasional, khususnya adalah adanya penyebaran pengaruh *Women in Development* (WID). Hal tersebut kemudian memicu semacam kebangkitan politik bagi para perempuan di Pakistan. Namun tinjauan ketiga memiliki kaitan terhadap kontribusi dalam membantu peneliti menemukan bagaimana kaum perempuan memiliki pengaruh dalam pemilihan parlemen atau dunia politik. Selain itu, artikel ini memberikan data terkait dengan isu kaum perempuan yang mendapatkan kekuasaan dalam parlemen dan dunia politik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa artikel ini memiliki kontribusi dalam penelitian yang dilakukan.

Berikutnya, yang menjadi pembeda antara artikel ini dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa artikel ini lebih membahas bagaimana kaum perempuan di dunia perpolitikan dan mendapatkan kekuasaan dalam parlemen. Sedangkan penelitian ini hanya akan berfokus kepada ketimpangan gender yang dirasakan oleh kaum perempuan di Pakistan. Oleh karena itu, artikel ini memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian ini.

¹² Mahbub Ul Haq Human Development Centre, 2015, *Human Development in South Asia 2015: the economy and the people*, Islamabad: Mahbub Ul Haq Human Development Center, 23

¹³ Mahbub Ul Haq Human Development Centre.

Tinjauan keempat yaitu, berupa artikel yang ditulis oleh Sara De Vido, dengan judul ”*Women’s Rights And Gender Equality In Europe And Asia*” pada tahun 2019 membahas tentang pentingnya untuk memerangi diskriminasi berdasarkan hukum (*de jure*) atau formal, yang tetap ada, pada kenyataannya (*de facto*) atau diskriminasi substantif yang dimana masih menjadi masalah yang sangat memprihatinkan.¹⁴ Dan prinsip non-diskriminasi tentang jenis kelamin diabadikan dalam sebagian besar konstitusi nasional, meskipun hal itu menyimpang dari konstitusi dari beberapa negara ASEAN, dan negara-negara yang telah mengadopsi undang-undang yang mempromosikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan dan diberbagai sektor lainnya.

Kontribusi artikel ini dalam penelitian yang dilakukan adalah membantu peneliti mendapatkan data terkait dengan diskriminasi substantif yang terjadi di Pakistan dan masih menjadi masalah yang sangat memprihatinkan hingga saat ini. Selain itu, artikel ini juga memberikan informasi terkait dengan kontribusi beberapa negara ASEAN dan negara-negara yang telah mengadopsi undang-undang kesetaraan. Sehingga dapat dikatakan bahwa artikel ini berkontribusi bagi peneliti dalam melakukan analisis terkait dengan topik penelitian yang diangkat.

Kemudian, artikel ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang diangkat yaitu bahwa artikel ini lebih berfokus kepada kasus diskriminasi substantif yang terjadi. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada peran dari organisasi

¹⁴ Amartya Sen, “Gender Inequality and Theories of Justice,” *Women, Culture, and Development: A Study of Women Capabilities*, World Institute for Developing Economic Research, (1995) Hal 14

internasional dan juga negara dalam mengatasi ketimpangan gender yang ada di Pakistan. Serta penelitian ini menggunakan teori *Norms Diffusion*.

Tinjauan selanjutnya adalah artikel dengan judul “UN Women in Pakistan” yang ditulis oleh organisasi UN Women pada tahun 2019. Artikel ini membahas tentang isu ketimpangan gender yang terjadi di Pakistan. Selain itu, artikel ini juga membahas terkait dengan program-program serta peran dan upaya yang dilakukan oleh organisasi UN Women dalam mengatasi isu ketimpangan gender di Pakistan tersebut. Dalam artikel ini juga dijelaskan terkait dengan bagaimana norma serta standar serta konflik dan kekerasan yang ada di tengah masyarakat Pakistan terutama kepada kaum perempuan.

Artikel ini kemudian membantu peneliti dalam mengetahui latar belakang dari organisasi UN Women yang berada di Pakistan. Selain itu, artikel ini juga memberikan informasi terkait dengan program-program serta peran yang dilakukan oleh UN Women dalam rangka mengatasi permasalahan terkait isu ketimpangan gender yang terjadi di tengah masyarakat Pakistan. Oleh karena itu, artikel ini berkontribusi dalam penelitian yang dilakukan ini.

Pembeda antara artikel ini dengan penelitian yang dilakukan adalah artikel ini berfokus kepada pembahasan terkait dengan bagaimana ketimpangan gender dapat terjadi di Pakistan, sedangkan penelitian yang dilakukan akan lebih berfokus kepada bagaimana peran UN Women sebagai organisasi internasional mengatasi permasalahan terkait dengan isu ketimpangan gender di Pakistan. Selain itu, artikel ini tidak menggunakan atau mencantumkan teori apapun dalam membahas isu

ketimpangan gender yang terjadi di Pakistan, sedangkan dalam penelitian ini digunakan teori *Norm Diffusion*.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Konsep Organisasi Internasional

Menurut Clive Archer, organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.

Pendapat lain yang datang dari Sumaryo Suryokusumo, mengatakan bahwa:

“Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul (Teuku May Rudy, 1998).”

Maka UN Women memiliki peran di level pertama yaitu dalam sistem internasional. UN Women berkontribusi bersama negara-negara salah satunya adalah pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sehingga UN Women sebagai organisasi internasional dalam menjalankan peran dan tugasnya yang tertuang dengan melalui fungsi yang mencakup fungsi informasi, normatif, pembuatan peraturan, pengawasan dan operasional untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan secara global.

Disisi lain, konsep Organisasi Internasional dengan norma entrepreneur berkaitan dengan UN Women yaitu berupa isu perlindungan perempuan dalam berbasis gender. Oleh karena itu, konsep dengan teori ini sama-sama melakukan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya, sekaligus mawadahi misi norm entrepreneur memperkenalkan norma.¹⁵ *Norm entrepreneur* yang dimaksud dapat bervariasi, mulai dari negara, organisasi lokal atau internasional, bahkan individu sekalipun, *norm entrepreneur* ini berfungsi untuk melakukan pembingkai ulang terhadap permasalahan dengan alasan esensial mengapa kehadiran norma baru menjadi penting. Pembingkai isu sendiri dapat dilakukan melalui interpretasi ulang permasalahan yang telah ada, atau bahkan menciptakan sesuatu yang baru.

1.7.2 Norm Entrepreneur

Finnemore dan Sikkink menekankan bahwa norm entrepreneurs bertindak dalam platform organisasi, seperti organisasi nonpemerintah (Frantz dan Pigozzi 2018). Keberadaan norm entrepreneurs sangat krusial dalam fase norm emergence karena mereka berperan sebagai pemerhati masalah atau pada konteks tertentu berperan sebagai pengonstruksi masalah, dengan menggunakan bahasa penamaan dan penafsiran yang dapat mendramatisir permasalahan yang diangkat. Tahap kedua adalah norm cascade, perbedaannya dengan tahapan norm emergence dipisahkan oleh tipping point yang menggambarkan peningkatan negara-negara

¹⁵ Achmad, Hal 105

¹⁶mulai terbuka terhadap norma baru. Norm cascade sendiri identik dengan proses sosialisasi norma internasional yang mengajak norm breakers menjadi norm followers sehingga sosialisasi menjadi mekanisme utama dalam tahapan tersebut. Tahapan terakhir, yaitu internalization atau internalisasi menjelaskan bagaimana seiring proses sosialisasi norma terjadi debat terkait norma tersebut berakhir dan muncul perilaku penerimaan terhadap norma yang dibangun. Penerimaan ini mendorong konsolidasi pada level lebih dalam sehingga mampu mengubah atau memperbaharui identitas yang dimiliki oleh negara terhadap permasalahan tertentu.

Pendekatan Teori *norm entrepreneur* konsep yang memahami serta menjelaskan masalah atau bahkan menciptakan masalah dengan menggunakan bahasa yang memahami. Norm entrepreneur ini juga memiliki kepentingan perempuan serta peran yang tepat untuk wanita. Norma-norma baru tidak pernah memasuki ruang normative yang sangat diperebutkan dimana mereka harus bersaing dengan yang lain, namun ada tiga tahapan yang dibahas yaitu *norm emergence*, *norm cascade*, *norm diffusion*. Teori ini membahas tentang studi hubungan internasional yang bermunculan dan internalisasi norma dalam bentuk proses yang ada dalam ketimpangan gender di dunia. Salah satunya norma ini

¹⁶¹⁶¹⁶¹⁶ United Nations, “Resolution adopted by the General Assembly on 14 September 2009”. Diakses melalui: <https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/513/62/PDF/N0951362.pdf?OpenElement> pada 5 Mei 2022.

lebih berfokus kepada isu penyetaraan ketimpangan gender khususnya di negara Pakistan.¹⁷

Tahapan pertama, *norm emergence* adalah tahapan siklus hidup norma yang meliputi proses siklus hidup dalam penyetaraan gender equality. Finnemore dan Sinkink menekankan bahwa *norm entrepreneurs* bertindak melalui platform organisasi seperti organisasi non pemerintah yang sangat krusial sebagai pengkonstruksi masalah. Tahapan kedua, *norm cascade* adalah dipisahkan oleh *tipping point* yang menggambarkan peningkatan negara-negara dengan ketimpangan yang baru.¹⁸

a. Norm Emergence

Norm emergence merupakan tahap pertama dari siklus hidup norma. Pada tahap ini, para pegiat norma (norm entrepreneur) berjuang meyakinkan aktor-aktor penting, yaitu negara-negara yang dinilai nantinya dapat menjadi pemimpin norma (norm leader). Mereka berupaya agar norm leader meyakini bahwa gagasan yang mereka sebarkan adalah sesuatu yang ideal dan layak untuk diterima. Para norm entrepreneur berupaya memperjuangkan suatu norma karena adanya rasa empati, altruism, ataupun komitmen dalam dirinya. Umumnya, norm entrepreneur merupakan transnational advocacy networks (TAN) yang berupa organisasi non pemerintah, komunitas epistemik, yayasan, advokat, aktivis, dll. Mereka berusaha meyakinkan para aktor lain dengan cara membingkai suatu isu dengan sedemikian rupa dan berupaya agar isu tersebut mendapat perhatian dalam masyarakat.

¹⁷ Park, S “Tahapan norma dan Teori” (Jakarta Galia Indonesia 2005) Hal 58

¹⁸ Park, S “ Norm entrepreneurs Teori” (Jakarta Galia Indonesia 2006) Hal 65

Norm entrepreneur berhasil meyakinkan aktor-aktor penting tersebut maka norma akan mencapai tipping point. Fase tipping point dicirikan dengan adanya penerimaan norma yang sedang dipromosikan oleh setidaknya sepertiga negara dalam sistem internasional dan negara-negara kritis. Negara kritis dapat dikatakan sebagai target atau tujuan utama dari penyebaran norma. Disebut kritis karena hampir tidak mungkin bahwa negara-negara tersebut menerima norma yang sedang diperjuangkan para norm entrepreneur. Setelah mencapai tipping point, norma akan memasuki tahap penyebaran atau yang dikenal sebagai norm cascade.

b. Norm cascade

Norm cascade adalah tahap di mana norma telah diterima secara luas oleh negara-negara dalam sistem. Pada tahap ini, mekanisme dominannya adalah sosialisasi norma oleh negara-negara yang merupakan norm leader kepada negara-negara lain dalam sistem internasional. Selain negara, sosialisasi juga dapat dilakukan oleh organisasi internasional dan jaringan-jaringan advokasi transnasional. Menurut Finnemore dan Sikkink, motivasi yang mendorong negara-negara dalam sistem menerima norma karena ini menyangkut identitas mereka sebagai bagian dari komunitas internasional. Dinamika yang berbeda mulai nampak dan lebih banyak negara yang mengadopsi norma meskipun tidak ada tekanan-tekanan domestik di dalam negara tersebut. Pada poin ini, Finnemore dan Sikkink menegaskan adanya pengaruh internasional ataupun regional, atau “penularan” dimana pengaruh norma yang berkembang di dunia internasional menjadi lebih penting daripada politik domestik yang dapat mempengaruhi norma.

Mekanisme utama pada tahap ini adalah sosialisasi internasional yang aktif, yang diharapkan dapat mendorong *norm breaker* untuk menjadi *norm followers*. Bukan hanya negara, jaringan *norm entrepreneur* dan organisasi internasional juga bertindak sebagai agen sosialisasi dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara menekan target untuk mengadopsi kebijakan dan hukum baru, meratifikasi perjanjian. Cara yang kedua adalah dengan memonitor pemenuhan terhadap standar internasional. Pada tahap ini, negara yang sudah mengadopsi norma terlebih dahulu disebut *norm leader*. *Norm leader* membujuk negara-negara lain untuk mengikuti norma yang ada.

c. **Norm internalization**

Norm internalization adalah adapun fase puncak dari siklus hidup norma, yaitu tahap internalisasi. Negara-negara dalam sistem telah menerima norma sebagai sesuatu yang absah sehingga mereka menerapkannya dalam lingkup domestik mereka. Hal itu diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Aktor yang berperan dalam mentranslasikan norma internasional menjadi kebijakan di tingkat lokal yaitu lembaga birokrasi. Dengan demikian, norma tersebut tidak diperdebatkan lagi oleh komunitas internasional. Sejumlah studi empirik menegaskan tingginya peran para ahli pembuat kebijakan dalam internalisasi norma. Hal ini dikarenakan posisi mereka sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan mampu menembus anggota-anggotanya. Mekanisme yang berlangsung pada tahap terakhir ini adalah perilaku dan kebiasaan. Ketika sebuah perilaku menjadi kebiasaan, kemudian diinternalisasikan. Perilaku yang sudah

diinternalisasi pada gilirannya akan mempengaruhi perubahan diantara anggota-anggota yang lain. Perubahan yang dimaksud adalah berubahnya identitas dan norma sebagai bentuk empati dan identifikasi. Hal yang paling mendasar dalam mekanisme ini adalah “persuasi diri” dan perselisihan kognitif. Dalam sebuah penelitian mengenai peran dan perselisihan kognitif ditemukan bahwa orang akan percaya apa yang mereka katakan, dan akan berupaya untuk menyelaraskannya dengan perilakunya. Jika diaplikasikan ke dalam suatu bentuk kolektif, maka ditemukan peran *standard operating procedures* (SOP) di sebuah organisasi, yang secara fungsional merupakan suatu kebiasaan, dan menghasilkan *out put* yang konsisten.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif-analisa. Dengan menggunakan analisis dari konsep yang telah dipilih sebelumnya, jenis dan metode ini dipilih untuk menjelaskan Peran UN Women dalam menjelaskan isu-isu ketimpangan gender di Pakistan .

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus dan tidak meluas, maka penulis menetapkan batasan untuk penelitian ini, batasan yang dipilih penulis yaitu dari tahun 2019-2023, tahun ini dipilih karena 2019 merupakan tahun dimana Pemerintah Pakistan melakukan organisasi UN women dalam hal ketimpangan

gender, sebelum akhirnya keluar dan berdinamika lagi pada tahun 2021 sampai sekarang.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan diteliti, dijelaskan atau diramalkan, sehingga unit analisis merupakan variabel dependen, yaitu perubahan dalam hal kebijakan pemerintah Pakistan tentang UN women dalam bentuk ketimpangan gender yang akan diteliti pada tahun 2019.

Tingkat analisis merupakan posisi dan level unit yang akan diteliti, dalam hal ini maka tingkat analisisnya berada pada level system karena perubahan ketimpangan gender dalam organisasi UN women yang akan dianalisis dengan memperhatikan struktur domestic dan struktur Internasional, sehingga ini melibatkan unsur-unsur di luar Negara Pakistan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan untuk menunjang penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan jenis pengumpulan data melalui bahan bacaan seperti buku, dokumen jurnal, arsip dan kajian literatur yang berhubungan dan tersedia di perpustakaan.¹⁹ Adapun untuk pengumpulan data akan dihimpun dari situs resmi pemerintah Pakistan yaitu UN women. Pakistan dan untuk situs resmi *Pakistan.gov* dan sebagai badan yang menaungi Peran UN

¹⁹ Mochtar Mas'oed, "Ilmu Hubungan Internasional- Disiplin dan Metodologi", (Jakarta: LP3ES, 1990), 35

women, selain itu data juga akan didapatkan dari sumber bacaan buku dan jurnal ilmiah, surat kabar, artikel dan situs-situs resmi yang terkait isu Pakistan mengatasi ketimpangan gender. Adapun sumber bacaan utama yang menjadi rujukan data penulis dalam melihat isu lingkungan Negara Pakistan untuk mengatasi ketimpangan perempuan dan meningkatkan pendidikan.

1.8.5 Teknis Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis sehingga penulis akan mengolah data menggunakan studi pustaka.²⁰ Pada bagian awal penulis akan melakukan reduksi data yang berkaitan dengan Pakistan dalam mengatasi ketimpangan gender, reduksi data sendiri merupakan tahap memilah-milah data yang dirasa berkesinambungan dengan penelitian penulis. Selanjutnya data-data tersebut akan dikelompokkan. Adapun maksud dari interpretasi adalah suatu teknik analisis data dengan menafsirkan makna dan anti substantif dari data dengan tujuan mengungkapkan sejumlah faktor yang saling berhubungan dan membentuk suatu kejadian peristiwa. Terakhir yaitu pengambilan kesimpulan merupakan proses mengambil inti pokok sari dari data-data yang sebelumnya telah diolah penulis.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat

²⁰ M. Nasir, Metode penelitian (Jakarta Galia Indonesia 2003) Hal 27

penelitian, kajian literatur, kerangka konseptual, metodologi penelitian yang terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknis pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II

ISU KETIMPANGAN GENDER DI PAKISTAN

Pada bab ini akan dijelaskan masalah ketimpangan gender Dengan faktor pendidikan yang rendah bahkan buta huruf membuat kontribusi para penduduk di usia produktif menjadi terbuang disebabkan oleh pendidikan yang kurang. Permasalahan women and child dari organisasi UN Women yaitu adanya anak perempuan yang putus sekolah dan adanya pernikahan muda. Maka organisasi UN women inilah mengatasi Permasalahan sosial di Pakistan tercatat sebagai negara dengan jumlah anak putus sekolah tertinggi kedua berdasarkan data dari UNESCO ditekankan bahwa Permasalahan gender sangat banyak sekitar hanya 54% anak perempuan terdaftar masuk sekolah dasar serta menurun untuk jenjang sekolah menengah menjadi 30%.

BAB III

UN WOMEN DI PAKISTAN DAN ISU KETIMPANGAN GENDER

Pada bagian awal bab ini Organisasi UN Women merupakan badan yang menaruh perhatian terhadap isu kesetaraan gender di Pakistan namun tujuan dibentuknya UN Women adalah untuk meningkatkan upaya yang dilakukan sistem PBB lainnya, seperti UNICEF, UNDP, dan UNFPA, yang semuanya bekerja secara berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, diarea keahlian masing-masing. Organisasi NGO ini membantu perempuan mempunyai pendidikan dan ekonomi yang stabil dan bergerak dalam bidang usaha. Bab ini akan menjelaskan Pakistan ini dibantu oleh pemerintah membentuk organisasi UN women dalam hal mengatasi ketimpangan gender di Pakistan tahun 2019-sekarang.

BAB IV PERAN UN WOMEN DALAM MENGATASI KETIMPANGAN GENDER DI PAKISTAN

Pada bab ini akan dijelaskan analisis konsep *norm entrepreneur* dalam membantu Pemerintah Pakistan dalam menangani isu ketimpangan gender gagal dikarenakan memiliki kesulitan dalam menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan Pakistan karena penyebabnya yang sudah menjadi bagian kehidupan di Pakistan yang

ditanamkan dari kecil. Diskriminasi ini dari kebiasaan adat yang membedakan akses yang dimiliki laki-laki dan perempuan di Pakistan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Perempuan Pakistan sangatlah menderita akibat pola pikir atau gagasan tentang kehormatan yang tidak berdasar ditentukan oleh norma sosial dan budaya, termasuk bagi pria yang menyangkal hak asasi perempuan. Laki-laki mengontrol dan mendikte perempuan Pakistan tentang pola perilaku, kegiatan, gerakan, terutama anggota keluarga laki-laki mereka dan bab ini akan menjelaskan kekerasan perempuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini menjelaskan kesimpulan akhir yang menjelaskan Pakistan dengan mengatasi ketimpangan gender dan melakukan saran untuk mengomentari tujuan UN women.

